

MEMBUMIKAN KONSEP ETIKA ISLAM DAN RELEVANSINYA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA (TELAAH PEMIKIRAN TRANSFORMATIF ABDURRAHMAN WAHID)

Wildah Nurul Islami¹

M Solahuddin

Abstrak

Abdurrahman Wahid termasuk salah satu pionir bagi perwujudan nilai-nilai etika Islam dengan pemikiran transformatif dalam memaknai ajaran Islam. Etika Islam terkait dengan nilai-nilai yang disepakati masyarakat sehingga memiliki relevansi dalam banyak bidang-bidang kehidupan, diantaranya bidang agama, politik dan kepemimpinan, hukum dan HAM, dan sosial budaya. Ada tiga strategi pengembangan etika Islam dalam upaya membumikan etika Islam sehingga diharapkan mampu mengatasi problematika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pertama, transformasi nilai-nilai etika islam ke dalam ranah sosial. Kedua, implementasi nilai-nilai etika Islam dalam mengatasi problematika kelompok minoritas yaitu nilai toleransi (menghormati perbedaan), nilai cinta perdamaian, nilai menegakkan keadilan, nilai persamaan kedudukan manusia di mata hukum dan negara, dan nilai kepedulian sosial. Ketiga, orientasi pengembangan etika islam harus diarahkan pada kesejahteraan umat (*al-maṣlahah al-‘āmmah*).

Kata Kunci: Konsep Etika Islam, relevansi, pemikiran transformatif

Abstract

Abdurrahman Wahid is one of the pioneers of the embodiment of Islamic ethical values with transformative thinking in interpreting Islamic teachings. Islamic ethics is related to values agreed upon by the community so that it has relevance in many areas of life, including in the fields of religion, politics and leadership, law and human rights, and social culture. There are three strategies for developing Islamic ethics in an effort to ground Islamic ethics so that it is expected to be able to overcome social problems in the life of the nation and state in Indonesia. First, the transformation of Islamic ethical values into the social realm. Second, the implementation of Islamic ethical values in overcoming the problems of minority groups, namely the value of tolerance (respecting differences), the value of peace love, the value of upholding justice, the value of equality of human position before the law and the state, and the value of social care. Third, the orientation of the development of Islamic ethics must be directed at the welfare of the people (*al-maṣlahah al-‘āmmah*).

¹ Dosen STAI Ar-Rosyid Surabaya, alamat email: wildahnurulislami@gmail.com

Keywords: Concept of Islamic Ethics, relevance, transformative thinking

A. Pendahuluan

Secara substansial, Islam mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan kehidupan umat manusia. Sebagai sistem nilai (tauhid, syariat, akhlak), Islam seharusnya dapat dipahami dan diamalkan sekaligus oleh setiap anggota masyarakat sehari-hari dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memahami ajaran Islam sebagai sumber etik, perlu mengedepankan kesejahteraan sosial (*al-maṣlahah al-‘āmmah*) dengan implementasi nilai-nilai ajaran agama yang mencakup etika individual dan sosial. Sedangkan untuk mengamalkan ajaran Islam sebagai agama yang *rahmatan li al-‘ālamīn*, perlu transformasi nilai-nilai Islam ke dalam ranah sosial yakni dari yang berorientasi meraih identitas lahiriah dalam melaksanakan ritual-ritual keagamaan secara ideal menuju Islam yang juga berfungsi untuk penyelamatan individu dan menyelesaikan problematika sosial.

Kondisi di atas merupakan hal-hal yang ideal bagi umat Islam, namun pada kenyataannya tidak selaras dengan substansi Islam sebagai panduan universal dalam tindakan moral. Islam yang semula hadir ke dalam sebuah masyarakat melalui prinsip-prinsip kebaikan moral, seperti keadilan, kejujuran, dan persamaan, justru berubah menjadi Islam yang terkesan tidak beretika dalam mengatasi berbagai problem sosial yang ada dalam masyarakat. Mayoritas umat Islam, khususnya masyarakat awam hanya meyakini pentingnya hal-hal yang terkait etika individual, belum menjamah pentingnya etika sosial. Ini terbukti dengan banyaknya umat Islam yang melakukan tindakan anarkis atas nama Islam seperti terorisme, tidak mengedepankan toleransi dalam perbedaan ideologi beragama sesama umat Islam, juga perbedaan SARA dalam kehidupan sosial, dan tidak peduli nasib kelompok minoritas di lingkungan sekitar.

Beberapa problematika sosial tersebut membuktikan telah mudarnya etika umat Islam sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang dahulu dikenal sebagai bangsa yang cinta damai, ramah, toleran, dan beradab. Hal ini disebabkan rendahnya kualitas pemahaman dan pengamalan masyarakat terhadap ajaran-ajaran moral agamanya. Loyalitas terhadap kelompok ideologi tertentu mendorong untuk saling unggul sehingga seringkali tidak sadar mereka mengorbankan kelompok minoritas yang

tidak bersalah. Selain itu, keinginan untuk mewujudkan cita-cita negara Islam menjadikan trauma dan ketakutan bagi kelompok masyarakat muslim dan non muslim di Indonesia yang cinta damai. Atas dasar inilah, perlu membumikan nilai-nilai etika Islam yang berorientasi pada kepentingan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Abdurrahman Wahid termasuk salah satu pionir bagi perwujudan nilai-nilai etika Islam meski diyakini bersifat kontra-produktif terhadap upaya menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan pluralisme di kawasan yang majemuk ini. Ia memiliki pemikiran transformatif dalam memaknai ajaran islam terutama dalam hal etika sosial. Ia meletakkan Islam sebagai sumber etik untuk menyelesaikan problem dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menerapkan konsep Islam yang mulanya oleh beberapa kelompok umat islam sebagai suplemen bagi Negara akhirnya menjadi komplemen agar tidak menjadikan Islam sebagai simbol-simbol agama sebagai legitimasi bagi kekuasaan. Betapa urgennya pemikiran Abdurrahman Wahid tentang konsep etika Islam yang ditransformasi ke dalam konteks sosial kebangsaan mendorong penulis untuk menelaah pemikiran transformatif Abdurrahman Wahid.

B. Metodologi Penelitian

Untuk menelaah pemikiran etika islam Abdurahman Wahid, baik teoretis dan praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka perlu direncanakan metodologi penelitian yang tepat, yakni sebagai berikut:

1. Pendekatan yang digunakan adalah diskriptif-kualitatif, sedangkan jenis penelitian adalah studi kepustakaan (*library research*).
2. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer berupa buku-buku yang ditulis oleh Abdurrahman Wahid, sedangkan data sekunder berupa buku-buku karya orang lain yang membahas pemikiran beliau.
3. Metode pengumpulan data adalah dokumentasi² dan metode analisis data adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analyzis*) dan hermenutik kritis.³

²Dokumentasi adalah barang-barang tertulis seperti buku, majalah, catatan harian, notulensi rapat dan sebagainya. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 158.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Konsep Etika Islam dalam Pandangan Abdurrahman Wahid

Pemikiran Abdurrahman Wahid bersifat transformatif karena gagasan-gagasannya mempresentasikan sintesis cerdas pemikiran Islam tradisional, modernisme Islam dan pemikiran Barat modern. Berdasarkan analisis terhadap pemikiran-pemikirannya yang transformatif, dapat dikemukakan beberapa konsep etika Islam dalam pandangan Abdurrahman Wahid, diantaranya:

a. Interpretasi Abdurrahman Wahid Tentang Etika Islam dan Pola Pengembangannya

Abdurrahman Wahid menyatakan bahwa etika islam (*islamic ethic*) itu memiliki makna sepadan dengan akhlak dan moral. Karena itu, ia sama sekali tidak membedakan penggunaan ketiga istilah tersebut baik dalam ucapan maupun tulisan.⁴ Tetapi Gus Dur membedakan ketiga istilah tersebut dengan kata etiket (*etiquette*) yang menurutnya sering disempitkan maknanya oleh masyarakat dengan arti kesusilaan belaka atau sopan santun dalam sikap hidup.⁵

Pengembangan etika islam secara teoritis dan implementatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu dilakukan. Hal itu akan menentukan terhadap masa depan peradaban bangsa dan tingkat kesejahteraan umat muslim. Dalam hal ini, pengembangan etika ditempuh melalui penciptaan etika sosial baru. Gus Dur menyatakan:

Dengan menampilkan universalisme baru dalam ajaran dan kosmopolitanisme baru dalam sikap hidup para pemeluknya, islam akan mampu memberikan perangkat sumberdaya manusia yang diperlukan oleh si miskin untuk memperbaiki nasib sendiri secara berarti dan mendasar, melalui penciptaan etika sosial baru yang penuh dengan semangat solidaritas sosial dan jiwa transformatif yang prihatin dengan nasib orang kecil.⁶

Dalam konteks Indonesia, pengembangan ajaran islam sebagai etika sosial menurut Gus Dur penting dilakukan, selain karena permasalahan-permasalahan di atas karena masih adanya kaum muslimin yang menghendaki islam sebagai alternatif hukum

³Untuk mengetahui secara jelas mengenai teori ini lihat Hans Georg Gadamer, *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), 10-48. Lihat juga Abdullah Khozin Afandi, *Hermeneutika* (Surabaya: Alpha, 2007), 81-90.

⁴Abdurrahman Wahid, *Islamku Islam Anda Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi* (Jakarta: The Wahid Institute, 2006), 233.

⁵Abdurrahman Wahid, *Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia& Transformasi Kebudayaan* (Jakarta: The Wahid Institute, 2007), 3.

⁶*Ibid.*, 14.

formal di Indonesia. Gus Dur menyatakan, “Penting adanya pengembangan ajaran Islam sebagai “etika sosial” dan bukan sumber materi hukum. Gagasan yang menempatkan “Islam sebagai jalan hidup” (syari’at) yang lebih berperan sebagai kekuatan moral (*moral force*) dalam masyarakat ketimbang sebagai seperangkat hukum formal...”⁷

Ada tiga pola pengembangan etika Islam dalam upaya membumikan etika Islam sehingga diharapkan mampu mengatasi problematika kehidupan sosial, diantaranya:

1. Transformasi nilai-nilai etika Islam yang ada ke dalam ranah sosial

Suatu masyarakat terdiri atas kelompok-kelompok manusia yang saling terkait oleh sistem-sistem, adat istiadat, ritus-ritus serta hukum-hukum khas dan yang hidup bersama. Kehidupan bersama ialah kehidupan yang di dalamnya kelompok-kelompok manusia hidup bersama-sama di suatu wilayah tertentu dan sama-sama berbagi iklim serta makanan yang sama.⁸ Menurut Gus Dur bahwa dalam sejarah panjang, ajaran Islam selalu menunjukkan keterkaitan antara urusan pribadi dan sosial. Untuk itu, Gus Dur menekankan supaya setiap ajaran dipahami secara baik. Gus Dur menyatakan:

Sejarah perkembangan Islam senantiasa memperlihatkan jalinan antara dua hal, yaitu sistem individu (perseorangan) dan sisi kemasyarakatan (sosial). Kedua hal tersebut harus dimengerti benar, kalau kita menginginkan pengetahuan mendalam akan agama tersebut. Kalau hal ini telah dilaksanakan, maka akan kita lihat beberapa kemungkinan untuk pengembangan lebih jauh.⁹

Transformasi ini barangkali dilatarbelakangi sebuah kenyataan bahwa umat Islam memiliki pandangan yang parsial dalam memahami teks atau ajaran agama yang sering dimaknai bersifat individual, tanpa mengaitkan dengan permasalahan sosial. Bila seorang muslim mampu menterjemahkan aspek keimanan yang bersifat pribadi ke dalam ranah sosial, maka orang tersebut menurut Gus Dur digolongkan sebagai ‘muslim yang baik’, yaitu seorang yang telah memenuhi lima syarat. Lima syarat tersebut yaitu menerima prinsip-prinsip keimanan, menjalankan ajaran (rukun) Islam secara utuh, menolong mereka yang memerlukan pertolongan (sanak-saudara, anak yatim, kaum miskin dan sebagainya), menegakkan profesionalisme dan bersikap sabar ketika menghadapi cobaan dan kesusahan.¹⁰

2. Implementasi Nilai-nilai etika Islam dalam Mengatasi Problematika Sosial

⁷Abdurrahman Wahid, *Islamku...*, 275.

⁸Murtadha Muthahhari. *Masyarakat dan Sejarah* (Bandung: Mizan, 1985), 15.

⁹Abdurrahman Wahid, *Islamku...*, 25.

¹⁰*Ibid.*, 4.

Selama ini, nilai-nilai etika Islam belum menjawab berbagai persoalan sosial di Indonesia, padahal etika Islam mencakup etika terapan yang juga berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial. Gus Dur menggunakan istilah etika terapan dengan etika sosial yang berpedoman pada sumber ajaran Islam, baik Qur'an dan hadis, kaidah ushul fiqh, maupun ajaran tasawuf. Diantara nilai-nilai etika sosial itu ialah nilai Toleransi (Menghormati Perbedaan, baik perbedaan pandangan ideologi politik, perbedaan dalam pilihan partai politik, perbedaan dalam mengemukakan pendapat dan berpikir, perbedaan keyakinan dan ideologi beragama), nilai kejujuran, nilai solidaritas, dan lain-lain. Dengan implementasi nilai-nilai etika ini, diharapkan masyarakat yang berbeda-beda dalam berbagai bidang apapun tetap saling menghormati dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, mengingat kemajemukan masyarakat Indonesia.

3. Orientasi pengembangan etika islam harus ke arah kesejahteraan umat

Orientasi pengembangan etika islam menurut pandangan Gus Dur adalah terwujudnya kesejahteraan atau dengan bahasa fikihnya "*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*" (kesejahteraan umum). Orientasi paham keislaman sebenarnya adalah kepentingan orang kecil dalam hampir seluruh persoalan. Dalam bahasa pembukaan UUD 1945, kata kesejahteraan tersebut dirumuskan dengan ungkapan lain, yaitu dengan istilah "masyarakat adil dan makmur". Itulah tujuan dari berdirinya sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam siklus berikut: hak setiap bangsa untuk memperoleh kemerdekaan, guna mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan meningkatkan kecerdasan bangsa, guna mencapai tujuan masyarakat adil dan makmur. Dengan menanggapnya sebagai tujuan bernegara, UUD 1945 jelas-jelas menempatkan kesejahteraan/keadilan-kemakmuran sebagai sesuatu yang esensial bagi kehidupan kita.

b. Sumber-Sumber Etika Islam Menurut Abdurrahman Wahid

1. Al-Qur'an dan Hadis

Al-Qur'an dan hadis merupakan sumber hukum utama yang menjadi pedoman bagi setiap muslim dalam segala bidang baik ekonomi, sosial budaya, pendidikan, dan politik meskipun penjelasannya tidak secara terperinci melainkan hanya berupa prinsip-prinsip dasarnya. Karena itu, agar nilai ajaran moral dari keduanya tetap

relevan dengan konteks zaman dan senantiasa memberi nilai-nilai solutif terhadap persoalan kemanusiaan, umat muslim dituntut untuk selalu mereinterpretasikan kandungan teksnya. Tanpa penafsiran ulang itu tentunya umat muslim akan sangat sempit memahami al-Qur'an. Gus Dur menyatakan:

Selama berabad-abad, kaum muslimin melakukan penafsiran kembali (reinterpretasi) wahyu tuhan itu sebagai acuan moral dalam menjalani kehidupan sehari-hari.¹¹ Namun, belum kontekstual dengan perubahan zaman. Padahal ajaran Islam telah berubah melalui perubahan zaman, dengan menggunakan cara tertentu. Di antara cara tertentu itu adalah penafsiran ulang (reinterpretasi) oleh kaum Muslimin sendiri, atas sesuatu yang tadinya diterima sebagai kebenaran lalu dianggap oleh kaum muslimin sendiri sebagai "kebenaran relatif" setelah adanya penafsiran ulang itu.¹²

Sebagai contoh penafsiran ulang terhadap sebuah ayat al Qur'an yang dilakukan Gus Dur adalah pada surat al-Anbiyā' ayat 107. Gus Dur menafsirkan:

Kata al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW. Diutus tidak lain untuk membawakan amanat persaudaraan dalam kehidupan (*wa mā arsalnāka illā rahmatan lil 'ālamīn*). Dengan kata "*rahmah*" diambilkan dari pengertian "*rahīm*" ibu, dengan demikian manusia semuanya bersaudara. Kata "*ālamīn*" disini berarti manusia, bukannya berarti semua makhluk yang ada. Jadi tugas kenabian yang utama adalah membawakan persaudaraan guna memelihara keutuhan manusia dan jauhnya tindak kekerasan dari kehidupan.¹³

Menurut Gus Dur, ribuan sumber tertulis (*dalil naqli*), baik yang berupa ayat-ayat kitab suci al-Qur'an maupun ucapan nabi Muhammad SAW, akan memiliki peluang yang sama bagi pendapat-pendapat yang saling berbeda dalam penafsiran, antara universalitas sebuah pandangan atau partikularitasnya di antara kaum Muslimin sendiri. Dengan demikian, menjadi jelaslah bagi kita bahwa perbedaan pendapat justru sangat dihargai oleh Islam, karena yang tidak diperbolehkan bukannya perbedaan pandangan, melainkan pertentangan dan perpecahan.¹⁴

2. Kaidah *Fiqh dan Uṣūl Fiqh*

Fiqh dan Uṣūl Fiqh adalah salah satu sumber hukum islam yang sering dirujuk Gus Dur dalam pokok-pokok pemikiran keislamannya termasuk pemikiran etika islam. Beliau mendorong umat muslim untuk mengembangkan kajiannya ke dalam wilayah

¹¹ Abdurrahman, *Islamku...*, 73.

¹² *Ibid.*, 125.

¹³ *Ibid.*, 111.

¹⁴ *Ibid.*, 28-29.

sosial. Kedua kajian tersebut perlu diperluas sehingga mencakup pembahasan atas ketimpangan sosial yang ada di masyarakat. Dengan demikian, perumusan hukum tidak hanya terhenti pada wilayah ibadah formal melainkan diperluas ke wilayah sosial. Dengan cara ini, Islam bisa berperan sebagai etika sosial.¹⁵ Beberapa kaidah fiqh yang secara teoritik dirujuk adalah *al-kulliyat al-khams* (lima buah jaminan hak dasar) dalam literatur hukum agama *al-kutub al-fiqhiyyah* kuno. Ajaran dasar ini orientasinya diberikan kepada masyarakat, baik perorangan maupun komunitas. Gus Dur juga sering merujuk pada kaedah *uṣul fiqh* berbunyi:

تصرف الإيمان منوط بالمصلحة

Kebijakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin terkait langsung kepada kesejahteraan rakyat yang dipimpin.

Gus Dur menjelaskan makna kaidah ini sebagai berikut:

Kesejahteraan masyarakat tidak akan tercapai, jika pemimpinnya tidak mewujudkan keadilan seluruh warga masyarakat, melainkan hanya untuk sebagian saja. Ini sangat penting diperhatikan karena kebanyakan di negeri-negeri muslim, seorang penguasa selalu menikmati kekayaan berlimpah, sementara banyak kaum miskin di sekelilingnya.¹⁶

c. Nilai-Nilai Etika Islam KH. Abdurrahman Wahid dan Bentuk Implementasinya

Gus Dur menggunakan istilah etika terapan dengan etika sosial yang berpedoman pada sumber ajaran Islam, diantaranya:

1. Nilai Toleransi

Gus Dur mengatakan bahwa umat muslim harus mengedepankan sikap toleransi terhadap setiap perbedaan yang ada dalam kehidupan berbangsa sehingga terjalin hubungan yang damai dan harmonis. Di antara bentuk implementasi nilai etika ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menurut beliau, antara lain: a. Menghormati perbedaan pendapat, b. Menghormati perbedaan keyakinan, c. Menghormati perbedaan pilihan partai politik.

¹⁵ Abdurrahman Wahid, "Fiqh dan Etika Sosial Kita," *Kompas*, 1987.

¹⁶ Abdurrahman Wahid, *Islamku*, 93.

2. Nilai Amanah

Diantara bentuk implementasi nilai amanah ini adalah kesungguh-sungguhan beliau menjalankan amanah bangsa Indonesia sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-3 yaitu selalu meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil, menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, tanpa ada diskriminasi sedikitpun dan menegakkan supremasi hukum dan konstitusi negara selama 2 tahun setengah hingga berakhirnya masa jabatan beliau dari proses politik yang tidak adil.

3. Nilai Keikhlasan

Ikhlas, tulus dan terbuka saling terkait satu sama lain. Jika nilai ikhlas ada pada diri para pemimpin, maka ia dapat diyakini akan membawa kebaikan dan perubahan bagi masyarakat. Gus Dur mengungkapkan bahwa yang dimaksud nilai keikhlasan dalam sistem politik adalah peleburan ambisi-ambisi pribadi masing-masing ke dalam pelayanan kepentingan seluruh bangsa.¹⁷ Di antara bentuk implementasi nilai etika ini adalah ketika mengemban amanat dalam beberapa organisasi antara lain sebagai ketua PBNU selama tiga periode dan sebagai presiden Republik Indonesia, Gus Dur tidak memiliki kepentingan sedikitpun melalui jabatan-jabatan tersebut, justru sepenuhnya melayani kebutuhan-kebutuhan umat dan bangsanya.

4. Nilai Kejujuran

Argumentasi utama Gus Dur tentang tuntutan penerapan nilai kejujuran dalam kehidupan kebangsaan adalah karena nilai kejujuran itu merupakan kunci penting bagi pemecahan masalah-masalah bangsa. Gus Dur menyatakan, “Kejujuran merupakan kunci pemecahan masalah yang kita hadapi sebagai bangsa dewasa ini. Dengan kejujuran inilah kita akan mengatasi krisis multidemisional. Ukuran kejujuran inilah yang akan menentukan kualitas kita sebagai bangsa.”¹⁸

5. Nilai Kepedulian

Peduli terhadap nasib orang miskin dan minoritas merupakan sikap terpuji yang harus dilakukan oleh seluruh warga masyarakat. Gus Dur mengatakan, “Orientasi ekonomi kita harus memperjuangkan nasib rakyat kecil serta kepentingan orang banyak.”¹⁹ Yang dimaksud kaum minoritas adalah kaum yang tertindas dan terdominasi

¹⁷ Abdurrahman Wahid, *Islamku...*, 237

¹⁸ *Ibid.*, 318.

¹⁹ *Ibid.*, 166.

oleh pihak-pihak tertentu yang mayoritas jumlahnya dan perlu dilindungi haknya. Solidaritas terhadap kaum minoritas merupakan hal yang penting untuk dilakukan karena setiap orang memiliki kebebasan, hak-hak yang perlu dibela. Gus Dur menyatakan, “Solidaritas terhadap nasib mereka, yang sampai sekarang pun masih mengalami tekanan-tekanan dan kehilangan segala-galanya. Puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang dipenjarakan, karena dituduh “terlibat” dan bahkan memimpin PKI.”²⁰ Prinsip etika ini adalah menaruh kepedulian kepada masyarakat lemah (kelompok minoritas) sebagai salah satu bentuk turut tanggung jawab moral terhadap permasalahan mereka. Sikap ini menurut Gus Dur penting sehingga perlu diutamakan.

6. Nilai Keadilan

Bagi Gus Dur, nilai adil dalam islam merupakan induk dari nilai-nilai lainnya yang harus dipraktekkan oleh umat muslim dalam segala bidang kehidupan, antara lain:

a. Dalam bidang hukum

Gus Dur mengungkapkan, “kita harus menegakkan keadilan, dan tidak menghukum mereka yang tidak bersalah.”²¹

b. Dalam bidang ekonomi

Gus Dur mengungkapkan, “Konsep keadilan pada prinsipnya berarti pemberdayaan kaum miskin atau lemah untuk memperbaiki nasib mereka sendiri dalam sejarah manusia yang terus mengalami perubahan sosial.”²²

c. Dalam hubungan internasional

Gus Dur mengungkapkan, “....bahwa etika global dan pemerintahan yang bersih (*good governance*) hanya akan ada artinya kalau hanya didasarkan pada dua hal: kedaulatan hukum dan keadilan dalam hubungan internasional”.²³

7. Nilai Ketegasan dan Keberanian

Ada beberapa hal yang merupakan bentuk implementasi nilai etika ini menurut Gus Dur, antara lain:

a. Dalam memperjuangkan kepentingan rakyat

²⁰ Abdurrahman Wahid, *Islamku...*, 155.

²¹ *Ibid.*, 156

²² *Ibid.*, 170.

²³ *Ibid.*, 356

Gus Dur berkata, “Seorang pemimpin harus memiliki keberanian moral untuk mengutamakan kepentingan rakyat, bukannya kepentingan sendiri atau pun kelompok”.²⁴

b. Dalam melawan kelompok garis keras

Gus Dur berkata, “Karena itu di perlukan keberanian bersikap tegas (kalau perlu bertindak keras), terhadap unsur-unsur garis keras yang mengacaukan keamanan.”²⁵

c. Dalam memerangi Terorisme

Gus Dur berkata, “Upaya memerangi terorisme memerlukan ketegasan sikap yang ditujukan untuk mereka, ini harus benar-benar diperhatikan.”²⁶

8. Nilai Kesabaran

Nilai etika ini perlu diimplementasikan ketika menghadapi masalah sosial:

a. Membangun moral bangsa

Gus Dur berkata, “Kita harus *merubah moralitas masyarakat dengan sabar* agar sesuai dengan ajaran-ajaran islam yang diyakini kebenarannya dengan memberi contoh yang baik sebagai wahana utama dalam pembentukan moralitas yang berlaku di tengah-tengah masyarakat .”²⁷

b. Memperjuangkan hak-hak wanita

Gus Dur berkata, “Memperjuangkan hak-hak wanita adalah pekerjaan yang masih berat di masa kini, hingga *wajiblah kita bersikap sabar* dan bertindak hati-hati dalam hal ini.”²⁸

c. Menegakkan demokrasi

Gus Dur berkata, “Kebenaran barulah ada artinya, kalau kita juga memiliki *kesabaran*. Kadangkala kebenaran itu baru dapat ditegakkan secara bertahap, seperti halnya demokrasi.”²⁹

d. Menegakkan kebenaran

Gus Dur berkata, “Kesabaran dalam membawakan kebenaran adalah sifat utama yang dipuji oleh sejarah.”³⁰

²⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku...*, 234.

²⁵ *Ibid.*, 339.

²⁶ *Ibid.*, 298.

²⁷ *Ibid.*, 72

²⁸ *Ibid.*, 131.

²⁹ *Ibid.*, 228.

³⁰ *Ibid.*, 229.

9. Nilai Memberi Maaf³¹

Sikap mudah memberikan maaf kepada orang lain yang bersalah baik secara sengaja maupun tidak kepada kita sangat dianjurkan dalam Islam. Gus Dur menyatakan, “Mengharuskan kita juga *mudah memberikan maaf* kepada siapapun, sehingga sikap saling memaafkan adalah sesuatu yang secara inherent menjadi sifat seorang muslim.”³²

10. Nilai Kearifan (Menedepankan Musyawarah)

Nilai kearifan ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang penuh keharmonisan di tengah-tengah realitas kehidupan yang plural. Gus Dur mengungkapkan, “Kearifan sikap justru sangat diperlukan, dan hanya didapat kalau kita sendiri mau mengerti dan mengambil pelajaran.”³³ Kearifan ini bermakna sikap saling mengerti dan memahami situasi dan kondisi lingkungan, baik lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara. Bentuk implementasi nilai etika ini diantaranya bersikap arif dalam menghadapi permasalahan bangsa seperti penanganan GAM di Aceh sehingga ditemukan penyelesaian yang terbaik.

11. Nilai Egaliter (Persamaan)³⁴

Bentuk implementasi nilai etika Islam ini ialah tidak menganggap kelompok minoritas seperti etnis tionghoa sebagai orang-orang asing di negara Indonesia, juga bagi mantan Napol dan Tapol PKI tetap sama kedudukannya di mata hukum dan negara karena sebagian mereka justru tidak mengetahui dan tidak menganut paham komunis. Dengan implementasi ini diharapkan kelompok minoritas tidak merasa lebih rendah dan diberi ruang gerak bagi pengembangan diri mereka di ruang publik. Bentuk implementasi lainnya ialah meluruskan bahwa hak lelaki dan wanita di muka hukum itu sama yang dijamin oleh UUD.

12. Nilai Kerendahan Hati

³¹Pemaaf adalah orang yang selalu memberikan maaf atau memaafkan kesalahan seseorang yang bersalah kepadanya.

³² Abdurrahman Wahid, *Islamku....*, 228

³³ *Ibid.*, 149.

³⁴ Egaliter adalah suatu sikap yang menganggap bahwa semua orang sederajat. Sikap seperti ini didasarkan pada paham egalitarianisme yaitu doktrin atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia-manusia itu ditakdirkan sama, sederajat, tidak ada perbedaan kelas dan kelompok.

Dalam hal ini, Gus Dur menyatakan: “...diperlukan kerendahan hati untuk melihat semua yang terjadi itu dalam perspektif kemanusiaan, bukannya secara ideologis.”³⁵ Sikap Islam jelas dalam hal ini, yaitu tidak menganggap rendah peradaban orang lain. Bahkan mengajukan untuk mencari keunggulan dari orang lain sebagai bagian pengembangnya.”³⁶

13. Nilai Kelapangan Dada

Lapang dada termasuk nilai etika yang harus dimiliki setiap orang. Nilai etika ini menunjukkan kebesaran hati untuk menerima kritikan dari orang lain atau menerima hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani. Gus Dur menyatakan, “Kita harus memiliki *kelapangan dada* untuk dapat menerima kehadiran pihak-pihak lain yang tidak sepaham dengan kita. Termasuk di dalamnya orang-orang mantan Napol dan Tapol PKI, yang kebanyakan bukan orang yang benar-benar memahami ideologi komunis.”³⁷

14. Nilai Kerjasama

Kerjasama sangat dibutuhkan dalam menangani kehidupan masyarakat, karena masing-masing memiliki keharusan menciptakan kesejahteraan lahir (keadilan dan kemakmuran) dalam kehidupan bersama, walaupun bentuknya berbeda-beda. Hal ini bisa dilakukan dengan dialog antar agama. Gus Dur menyatakan, “Perbedaan keyakinan tidak membatasi atau melarang kerjasama antara Islam dan agama-agama lain, terutama dalam hal menyangkut kepentingan umat manusia.”³⁸

15. Nilai Cinta Kedamaian dan Anti kekerasan

Salah satu bentuk implementasi etika ini adalah permintaan Gus Dur agar supaya penyelesaian damai di Irak, dikaitkan langsung dengan upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Ini menjadikan baik Israel maupun seluruh bangsa-bangsa Arab akan berkepentingan untuk menjaga perdamaian tersebut di kawasan Timur Tengah. Disinilah terletak kaitan vital antara penyelesaian sengketa Irak di satu pihak dan sengketa Israel-Palestina di pihak lain.³⁹ Dengan implementasi nilai etika ini, diharapkan kelompok minoritas merasa aman meski berbeda dan menuai perselisihan karena segala masalah bisa diselesaikan dengan cara damai (berunding).

³⁵ Abdurrahman Wahid, *Islamku*, 157.

³⁶ *Ibid*, 366.

³⁷ *Ibid*, 158.

³⁸ *Ibid.*, 134.

³⁹ *Ibid*.

2. Relevansi Nilai Etika Islam dalam Bidang Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Dalam memahami relevansi nilai etika islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perlu mengkaji terlebih dahulu tentang pentingnya memaknai Indonesia sebagai negara demokrasi, bukan negara islam dalam pandangan Abdurrahman Wahid. Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengedepankan prinsip demokrasi dengan ideologi Pancasila sebagai dasar negara. Namun, konsep demokrasi di Indonesia masih belum menemukan bentuknya yang mapan. Banyak perdebatan di kalangan akademisi hanya sebatas tentang apa dan bagaimana penerapan demokrasi. Meminjam istilah Gallie, demokrasi adalah *essentially contested concept*, sebuah konsep yang secara esensial diperebutkan pemaknaannya. Ketidakjelasan definisi demokrasi sebenarnya terkait dengan persoalan kejelasan identitas keindonesiaan.⁴⁰

Tentang demokrasi, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia itu berkembang. Tidak ada yang bisa dibilang mana model demokrasi yang cocok dan layak karena demokrasi itu politik. Politik itu alat, seni mencapai hal yang dimungkinkan. Yang penting model apapun yang diterapkan, harus setia kepada cita-cita yang ideal.⁴¹ Karena demokrasi mengedepankan kebebasan berbicara, mengutarakan pendapat dan berekspresi, maka seringkali menuai berbagai kontroversi, baik dalam pendapat maupun sikap. Mengingat Indonesia memiliki beragam suku, agama, ras, budaya, dan golongan-golongan tertentu dengan ideologi berbeda, maka kontroversi merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Namun, semua bisa diatasi dengan menerapkan etika sosial Islam. Sebagaimana dipaparkan di atas bahwa Gus Dur sangat menjunjung tinggi prinsip demokrasi, namun dalam pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Islam sebagai etika sosial.

Indonesia terdiri dari masyarakat yang beragam, baik muslim maupun non muslim. Jika negara Islam tetap ingin diwujudkan, maka akan ada warga negara minoritas (non muslim) yang berada di bawah posisi warga negara mayoritas (muslim). Hal ini justru memunculkan diskriminasi terhadap warga negara minoritas. Oleh karena

⁴⁰Masdar Hilmy. Islam Profetik; *Substansialisasi Nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik* (Yogyakarta: Kanisius, 2008), 76-77.

⁴¹ Abdurrahman Wahid. *Tabayun Gus Dur* (Yogyakarta: LkiS, 1998), 112.

itu, Gus Dur mengatakan bahwa NU tidak memperjuangkan Indonesia menjadi NII karena kemajemukan yang tinggi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kenyataan seperti inilah yang sering dikacaukan oleh orang yang tidak mau mengerti bahwa mendirikan sebuah NII tidak wajib bagi kaum muslimin, tetapi mendirikan masyarakat yang berpegang kepada ajaran-ajaran Islam adalah suatu yang wajib.⁴²

Negara Indonesia yang demokratis tidak menginginkan adanya warga negara yang minoritas, tertindas dan termarginalkan dalam kehidupan sosial kebangsaan. Semua warga negara harus memiliki persamaan hak, kewajiban dan peran sosial di masyarakat. Meskipun dalam tubuh kaum muslimin sendiri terdiri dari golongan ideologi tertentu yang berbeda, tetap harus menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang anti kekerasan dalam menghadapi perbedaan. Kita harus memahami bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi yang tidak memaksakan keyakinan tertentu kepada orang lain dan tidak bertindak anarki terhadap pihak yang berbeda tersebut. Yang harus dijunjung tinggi adalah toleransi beragama terhadap perbedaan yang ada karena perbedaan itu adalah rahmat bagi umat.

Merupakan sikap keberagamaan yang harus diteladani dari Gus Dur ialah prinsip Islamku, Islam Anda, Islam Kita. Islam yang dipikirkan dan dialaminya adalah sesuatu yang khas, yang dapat disebutkan sebagai “Islamku”, hingga karena watak perorangan seperti itu patut dipahami sebagai pengalaman pribadi, yang patut diketahui orang lain tanpa memiliki kekuatan pemaksa. Sementara “Islam Anda” lebih merupakan apresiasi dan refleksi Gus Dur terhadap tradisionisme atau ritual keagamaan yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks ini, Gus Dur memberikan apresiasi terhadap kepercayaan dan tradisi keagamaan sebagai kebenaran yang dianut oleh komunitas masyarakat tertentu yang harus dihargai. “Islam Kita” lebih merupakan derivasi dari keprihatinan seseorang terhadap masa depan Islam yang didasarkan pada kepentingan bersama kaum Muslimin.⁴³

Dari sini kita bisa mengambil makna pentingnya memahami Indonesia sebagai negara demokrasi, bukan negara Islam. Karena heterogenitas masyarakat di Indonesia, maka nilai-nilai etika Islam selaras dengan prinsip demokrasi yang mengutamakan kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat minoritas tanpa melihat perbedaan

⁴² Nur Khalik Ridwan, *Gus Dur dan Negara Pancasila* (Yogyakarta: Tanah Air, 2010), 73-74.

⁴³ Abdurrahman Wahid, *Islamku....*, xiv.

SARA. Nilai-nilai etika yang diajarkan oleh Islam menyimpan kebaikan moral untuk kesejahteraan sosial sehingga relevan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Maka tidak salah Gus Dur mengutamakan etika sosial di negara demokrasi tanpa harus mendirikan negara Islam.

Etika Islam terkait dengan nilai-nilai yang disepakati oleh individu dalam masyarakat sehingga memiliki relevansi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyak bidang-bidang kehidupan yang bisa direlevansikan dengan penerapan nilai-nilai etika Islam atau istilah Gus Dur dengan etika Islam baru yang mengedepankan kesejahteraan sosial, diantaranya:

a. Bidang Agama

Etika Islam sangat relevan diterapkan dalam bidang agama mengingat banyak problematika terkait perbedaan cara pandang keberagamaan, apalagi kelompok mayoritas ideologi agama di daerah tertentu mendominasi kelompok minoritas ideologi tertentu. Termasuk didalamnya munculnya gerakan-gerakan islam radikal yang seringkali memaksakan pemahaman dan kehendak kepada kaum muslim lainnya untuk menerima dan mendukungnya. Akibatnya, jika mereka tidak mendapatkan respon positif, lalu melakukan tindakan-tindakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama.

Dari sinilah, nilai-nilai etika Islam Gus Dur mendapatkan relevansinya untuk dipelajari dan dipraktekkan guna menyelesaikan masalah keberagamaan yang penyebabnya bermuara pada rendahnya moralitas umat muslim baik dari kalangan pejabat maupun warga bangsa biasa. Dalam hal ini, Gus Dur pernah menyatakan “meyakini sebuah kebenaran, tidak berarti hilangnya sikap menghormati pandangan orang lain⁴⁴ dan keyakinan masing-masing tidak perlu diperbandingkan atau dipertentangkan karena perbedaan merupakan sebuah hal yang diakui islam, sedangkan yang dilarang adalah perpecahan dan keterpisahan.”⁴⁵

b. Bidang Politik dan Kepemimpinan

Etika Islam sangat relevan diterapkan dalam bidang politik dan kepemimpinan mengingat banyak problematika perbedaan ideologi politik dan kepemimpinan yang tidak pro rakyat banyak. Karena Indonesia sebagai negara demokrasi, maka ideologi

⁴⁴ Abdurrahman Wahid, *Islamku....*, 236.

⁴⁵ *Ibid.*, 134.

politik yang berbeda merupakan hal yang wajar asalkan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai etika Islam tanpa harus mementingkan labelisasi Islam. Dalam hal ini, Gus Dur mengatakan bahwa demokrasi mengajarkan kita untuk menghormati eksistensi parpol-parpol Islam, tetapi ini tidak berarti keharusan untuk mengikuti mereka.⁴⁶

c. Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

Etika Islam sangat relevan diterapkan dalam bidang hukum dan HAM mengingat banyak problematika terkait ketidakadilan memutuskan perkara dalam bidang hukum dan ketidakadilan meletakkan peran dan kedudukan manusia yang juga memiliki hak asasi yang harus dihargai. Dalam masalah ini, nilai-nilai etika Islam yang bisa diterapkan adalah menegakkan keadilan dan menghormati persamaan peran dan kedudukan manusia di mata hukum dan negara. Artinya, tidak boleh ada diskriminasi kelompok mayoritas yang memiliki kekuatan ekonomi dan kedudukan sosial terhadap kelompok minoritas yang lemah dalam hal ekonomi maupun kedudukan sosialnya.

Adapun mengenai hak asasi manusia, Gus Dur selalu melawan anggapan atau penyebutan umat Budha, yang sebagian besar dianut oleh suku Tionghoa di negeri ini, sebagai “warga keturunan” sehingga harus memberi kerangka gerak yang memadai bagi umat Budha, yang merupakan salah satu asset (kekayaan) bangsa kita.⁴⁷ Selain itu, Gus Dur mengutamakan memperjuangkan hak lelaki dan hak wanita menjadi semakin berimbang karena memang Islam menilai seperti itu.⁴⁸

d. Bidang Sosial Budaya

Etika Islam sangat relevan diterapkan dalam bidang sosial budaya mengingat banyak problematika terkait masalah aksi umat Islam yang mengecam dan mencerca “goyang ngebor” Inul Daratista dan sebagian penyanyi dangdut lainnya yang baru merintis karir. Meskipun secara hukum Islam tidak sesuai, namun Gus Dur melihatnya dengan etika Islam yang mementingkan sisi sosial budaya. Nilai-nilai tersebut ialah melindungi hak asasi manusia “*wong cilik*” dari hegemoni elit keagamaan dan klaim atas moralitas kesenian yang agak represif. Padahal tujuannya mencari nafkah melalui seni menyanyi tanpa pantang menyerah. Dukungan Gus Dur

⁴⁶ Abdurrahman Wahid, *Islamku...*, 7.

⁴⁷ *Ibid.*, 137.

⁴⁸ *Ibid.*, 131.

bukan masalah sepakat atau tidak dan bukan melihat sisi formalnya yang dianggap sebagai bentuk penebaran nilai-nilai pornografi, tapi melihat dari segi substansi yang dilakukannya ketika dia mampu bersaing dengan penyanyi lain yang lama mendominasi, sekaligus melepaskan diri dari keterpurukan ekonomi.⁴⁹

e. Bidang Ekonomi dan Bisnis

Etika Islam Gus Dur sangat relevan diterapkan dalam bidang ekonomi dan bisnis di Indonesia mengingat masih adanya problematika kemiskinan yang dialami dan dirasakan oleh bangsa Indonesia termasuk warga Nahdliyyin. Jika diperhatikan akar penyebab utama terjadinya kemiskinan yang mendera sebagian besar bangsa Indonesia hingga kini adalah faktor struktural. Yaitu adanya ketidakadilan yang secara sengaja dibuat oleh pemerintah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dari hasil konspirasi dengan pihak-pihak pemegang modal melalui pembuatan kebijakan ekonomi yang tidak pro kemiskinan sebaliknya pro konglomerasi. Bentuk perhatian kepada rakyat kecil atau miskin adalah lebih mengutamakan melalui program pemberdayaan usaha mereka melalui pemberian modal, pembinaan keterampilan atau skill yang terkait dengan usaha yang ditekuni masyarakat dan selanjutnya memberikan santunan-santunan secara langsung kepada mereka. Praktek etika ini seperti inilah yang telah dicontohkan oleh Gus Dur kepada bangsa Indonesia.

D. Penutup

Untuk memahami ajaran Islam sebagai sumber etik, perlu mengedepankan kesejahteraan sosial (*al-maṣlaḥah al-‘āmmah*) dengan implementasi nilai-nilai ajaran agama dan transformasi nilai-nilai Islam ke dalam ranah sosial. Abdurrahman Wahid termasuk salah satu pionir bagi perwujudan nilai-nilai etika Islam, meski diyakini bersifat kontra-produktif terhadap upaya menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, HAM dan pluralisme di kawasan yang majemuk ini. Beliau memiliki pemikiran transformatif dalam memaknai ajaran Islam terutama dalam hal etika sosial.

Penegakan etika Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara merupakan sebuah konsekuensi logis bagi umat Islam karena Indonesia bukanlah Negara Islam melainkan Negara bangsa (demokrasi) yang terpisah secara formal dari agama. Hanya perlu disadari bahwa oleh Gus Dur sendiri pekerjaan itu terasa berat. Namun,

⁴⁹Wasid. *Gus Dur Sang Guru Bangsa* (Yogyakarta: Interpena, 2010), 137-138.

pengembangan etika perlu diupayakan melalui penciptaan etika sosial baru yang penuh dengan semangat solidaritas sosial dan jiwa transformatif yang prihatin dengan nasib orang kecil.

Etika Islam terkait dengan nilai-nilai yang memiliki relevansi dalam banyak bidang-bidang kehidupan yang bisa direlevansikan dengan penerapan etika Islam atau istilah Gus Dur dengan etika sosial baru yang mengedepankan kesejahteraan sosial, diantaranya bidang agama, bidang politik dan kepemimpinan, bidang hukum dan HAM, dan bidang sosial budaya. Ada tiga strategi pengembangan etika Islam dalam upaya membumikan etika Islam sehingga diharapkan mampu mengatasi problematika kelompok minoritas di Indonesia, diantaranya: 1. Transformasi nilai-nilai etika islam ke dalam ranah sosial, 2. Implementasi nilai-nilai etika Islam dalam mengatasi problematika kelompok minoritas yaitu nilai toleransi (menghormati perbedaan), nilai cinta perdamaian, nilai menegakkan keadilan, nilai persamaan kedudukan manusia di mata hukum dan negara, dan nilai kepedulian sosial, 3. Orientasi pengembangan etika islam harus ke arah kesejahteraan umat.

E. Daftar Pustaka

Afandi. 2007. *Hermeneutika*. Surabaya: Alpha.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Gadamer, Hans Georg. 2004. *Kebenaran dan Metode: Pengantar Filsafat Hermeneutika*, terj. Ahmad Sahidah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hilmy, Masdar. 2008. *Islam Profetik; Substansialisasi Nilai-nilai Agama dalam Ruang Publik*. Yogyakarta: Kanisius.

Muthahhari, Murtadha. 1985. *Masyarakat dan Sejarah*. Bandung: Mizan.

Ridwan, Nur Khalik. 2010. *Gus Dur dan Negara Pancasila*. Yogyakarta: Tanah Air.

Wahid, Abdurrahman. 1998. *Tabayun Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS.

_____. 2006. *Islamku Islam Anda Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*. Jakarta: The Wahid Institute.

_____. 2007. *Islam Kosmopolitan; Nilai-Nilai Indonesia dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute.

_____. 2007. "Gus Dur Menjawab Kegelisahan Rakyat," *kompas*.
Jakarta: Kompas.

Wasid. 2010. *Gus Dur Sang Guru Bangsa*. Yogyakarta: Interpena.